

## SOSIALIS DEMOKRAT DALAM PRAKTIK DI INDONESIA

**Mhd. Alfahjri Sukri**

IAIN Batusangkar

[malfahjrisukri@iainbatusangkar.ac.id](mailto:malfahjrisukri@iainbatusangkar.ac.id)

Diterima: 1 Maret 2021

Disetujui: 5 April 2021

Dipublikasikan: 7 April 2021

### ***Abstract***

*This study aims to analyze democratic socialist practices in Indonesia by taking the case of the Indonesian Socialist Party (PSI) and also looking at the compatibility of democratic socialists with democratic practices in Indonesia. The method used is a qualitative method by describing the results of the analysis carried out. The results of the research show, in practice in Indonesia, PSI with its social democratic ideology shows that social democrats are different from communism, this can be seen in the form of struggles carried out by PSI who struggle in a persuasive way, evolution, does not use violence (revolution), and struggles with constitutional way by participating in general elections. The programs offered by PSI are characteristic of social democrats, namely social security programs, human rights, demanding a role for the state to maintain the welfare of its people. The failure of PSI in the 1955 Election was caused by internal factors such as PSI having no cultural or religious basis, the programs and language used were not understood by the lower class. From the practice of social democrats in Europe and Indonesia, it can be said that social democrats are compatible with or compatible with democracy, even social democrats have contributed to the development of democracy for the welfare of the Indonesian people.*

**Keywords:** *Socialism, Social Democrats, Indonesian Socialist Party (PSI).*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek sosialis demokrat di Indonesia dengan mengambil kasus Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan juga melihat kecocokan sosialis demokrat dengan praktek demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan hasil analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan, dalam prakteknya di Indonesia, PSI dengan paham sosialis demokratnya menunjukkan sosialis demokrat berbeda dengan komunisme, hal ini terlihat dalam bentuk perjuangan yang dilakukan oleh PSI yang berjuang dengan cara persuasif, evolusi, tidak menggunakan kekerasan (revolusi), serta berjuang dengan cara konstitusional dengan ikut dalam pemilihan umum. Program-program yang ditawarkan PSI merupakan ciri khas dari sosialis demokrat yaitu program jaminan sosial, hak asasi manusia, menuntut adanya peranan negara untuk menjaga kemakmuran masyarakatnya. Adapun kegagalan PSI dalam Pemilu 1955 disebabkan oleh faktor internal PSI sendiri seperti tidak memiliki basis budaya maupun agama, program-program serta bahasa yang digunakan tidak dimengerti masyarakat bawah. Dari praktek sosialis demokrat di Eropa maupun Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa sosialis demokrat sesuai atau kompatibel dengan demokrasi,

bahkan sosialis demokrat memberikan kontribusi untuk perkembangan demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Sosialisme, Sosialis demokrat, Partai Sosialis Indonesia (PSI).

## Pendahuluan

Sosialis demokrat merupakan salah satu variasi dari sosialisme yang berbeda dengan komunisme. Gagasan sosialis demokrat ini awalnya berkembang di Eropa yang menganut negara kesejahteraan. Sosialis demokrat muncul tidak lepas dari protesnya terhadap kapitalisme yang dianggap menindas masyarakat serta memberikan perbedaan besar antara yang miskin dengan kaya. Bagi sosialis demokrat, negara harus berperan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>1</sup> Berbeda dengan para penganut kapitalisme yang menginginkan negara hanya sebagai penjaga malam saja atau pengawas yang tidak perlu ikut campur dalam masalah individu. Bagi kapitalis, negara hanya berfungsi untuk melindungi individu agar para individu aman dalam mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya.

Sosialis demokrat tidak bisa dilepaskan dari induknya yaitu sosialisme. Sosialisme sebagai suatu kekuatan politik muncul di saat kapitalisme berkembang terutama di saat industri modern berkembang.<sup>2</sup> Sosialisme muncul sebagai respon terhadap kapitalisme industri modern yang menciptakan kesengsaraan bagi golongan tertentu serta kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Sosialisme berkembang dengan lahirnya sosialis demokrat dan sosialisme yang merupakan awal tahap komunisme. Sosialis demokrat sendiri kemudian berkembang di negara-negara yang masyarakatnya juga pernah mengalami industrialisasi, tetapi dalam negara yang masyarakatnya relatif liberal atau yang memiliki akar demokrasi yang kuat seperti Selandia, Amerika Utara, Australia dan Eropa Barat.<sup>3</sup> Namun ternyata sosialis demokrat juga berkembang di Indonesia dengan tokohnya yaitu Sutan Sjahrir dengan partainya adalah Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Berkembangnya sosialis demokrat di Eropa Barat terlihat dengan munculnya partai-partai sosialis di Skandinavia yang berhasil menuju tumpuk kekuasaan. Di Swedia partai sosialis berkuasa selama 44 tahun (1932-1976), dan sesudah dikalahkan dalam pemilihan umum 1976, kembali menang pada pemilihan umum 1982. Di sini, negara kesejahteraan dianggap berhasil memberikan pelayanan kesejahteraan. Di Austria sendiri, partai sosialis berkuasa sejak akhir Perang Dunia II. Di Jerman, partai sosialis demokrat bersama partai liberal berkuasa dari tahun 1973-1982.<sup>4</sup>

Partai sosialis sendiri di Eropa<sup>5</sup> mulai menunjukkan pengaruhnya dengan kemenangan-kemenangan pada Pemilihan Umum di berbagai negara. Mereka dapat membentuk pemerintahan

---

<sup>1</sup> Aspin Nur Arifin Rivai, "Friedrich Ebert Stiftung dan Sosial Demokrasi: Memahami Aktifitas Gerakan Sosial Global dalam Penyebarluasan Diskursus di Indonesia," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 2, No. 2, 2016.

<sup>2</sup> William Ebenstein, *Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia*, (Yogyakarta: Narasi, 2006), p. 299.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 280.

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo (ed), *Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), p. 17.

<sup>5</sup> Untuk saat ini, partai yang beraliran social demokrat di Denmark yaitu Partai Socialdemokraterne memenangi pemilu pada 5 Juni 2019 lalu, hal yang sama juga terjadi di Portugal dengan kemenangan Partido Social Democrata (PSD) dan di Spanyol dengan kemenangan Partai Buruh Partido Socialista Obrero Espanol yang menang pada April 2019 lalu. Namun, di beberapa negara lain social democrat juga mengalami kekalahan dan kemunduran seperti yang terjadi di Prancis, Belanda dan Swedia. Lihat, Christoph Hasselbach, *Perjuangan Sosialis demokrat di Eropa:*

sendiri serta menjalankan program mereka tanpa kekerasan. Sebagaimana yang terjadi di Inggris pada tahun 1945 dengan kemenangan partai buruh dan memimpin selama enam tahun dengan membangun pondasi negara kesejahteraan dengan menasionalisasikan hampir semua alat produksi yaitu air, listrik, transportasi serta batu bara. Partai juga memberikan pelayanan sosial pada masyarakatnya, khususnya pada bidang kesehatan.<sup>6</sup>

Program-program yang menjadi program unggulan partai-partai tersebut adalah memberikan jaminan sosial yang luas bagi rakyatnya dengan tetap menjaga surplus yang kemudian disisakan untuk diinvestasikan kembali, agar industri tetap produktif. Apabila surplus ini terlampaui banyak dialihkan untuk mewujudkan negara kesejahteraan, industri menjadi mundur dan akhirnya tidak akan dihasilkan kekayaan yang cukup untuk memberikan “kesejahteraan”. Banyak partai sosialis demokrat yang berhasil menang di Eropa dan kompatibel dengan demokrasi. Sehingga menarik untuk melihat bagaimana praktek partai dengan aliran sosialis demokrat di Indonesia. Penelitian ini mengambil Partai Sosialis Indonesia (PSI) (1948-1960) sebagai studi kasus serta menganalisis bagaimana praktek partai beraliran sosialis demokrat tersebut dalam kehidupan politik di Indonesia.

Berkaitan dengan sosialisme demokrat sendiri, Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa memang terdapat banyak tafsiran mengenai sosialisme. Di antara tafsiran tersebut, menyebutkan terdapat dua kelompok besar yaitu 1) sosialisme yang disebut dengan sosialis demokrat atau demokrasi sosial, 2) sosialisme yang menjadi tahapan awal dari komunisme. Dua kelompok ini sangat bertolak belakang. Tahun 1827 menjadi awal dipakainya Sosialisme, merujuk pada Robert Owen (1771-1858) yang pada saat itu melihat kesengsaraan rakyat, serta ingin meringankan kesengsaraan tersebut. Di sisi lain, Karl Marx memiliki pandangan lain yang ingin menekankan revolusinya, karena sistem kapitalis hanya bisa dihancurkan lewat revolusi. Istilah sosialisme kembali dihidupkan oleh Lenin (1870-1924) yang mengartikan bahwa sosialisme adalah permulaan dari komunisme. Sosialisme yang merupakan permulaan komunisme disandarkan pada ajaran Marxisme-Leninisme. Perbedaannya adalah sosialis demokrat melaksanakan cita-cita mereka melalui evolusi, persuasi, dan tanpa kekerasan. Berbeda dengan sosialisme yang dipengaruhi Marxisme-Leninisme yang cita-citanya dicapai dengan cara kekerasan atau revolusi.<sup>7</sup>

Peter L. Berger mengatakan, demokrasi lebih dekat dengan kapitalisme dibandingkan sosialisme. Tidak ada suatu demokrasi yang bukan merupakan bagian dari jaringan internasional ekonomi kapitalis. Tidak ada masyarakat yang sepenuhnya sosialis yang bersifat demokratis. Terdapat korelasi positif antara kapitalisme dan demokrasi, sedangkan antara sosialisme dan demokrasi terdapat korelasi yang negatif. Semua masyarakat yang demokratis sekaligus merupakan masyarakat yang kapitalis, walaupun ada masyarakat kapitalis yang tidak demokratis. Sosialisme lebih dekat kepada otoritarisme dan totalitarisme. Berger juga mencoba untuk menjelaskan bahwa terdapat dua jenis masyarakat non-demokratis (merujuk pada Hannah Arendt), yaitu jenis totalitarisme dan otoritarisme. Berger menyatakan bahwa semua masyarakat totaliter yang pernah ada bersifat sosialis. Adapun sistem otoriter bisa terdapat dalam masyarakat kapitalis maupun sosialis. Dari sini Berger mengatakan terdapat korelasi positif antara sosialisme dengan totalitarisme, dan korelasi negatif antara sosialisme dengan demokrasi.<sup>8</sup> Namun, pendapat Berger ini dibantah oleh Kenneth J. Arrow yang mengatakan, hanya sedikit orang-

---

*Antara Kegagalan dan Keberhasilan*, (Deutsche Welle (DW): <https://www.dw.com/id/perjuangan-sosial-demokrat-di-eropa-antara-kegagalan-dan-keberhasilan/a-49136828>, Diakses pada tanggal 10 desember 2020, 2019).

<sup>6</sup> Budiardjo (ed), *Simposium*, p 14-15.

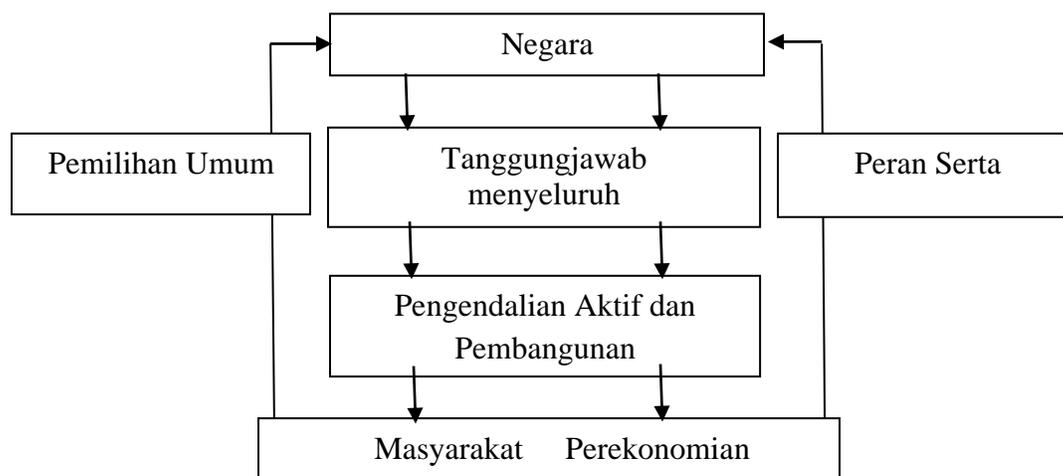
<sup>7</sup> *Ibid*, p 3-4.

<sup>8</sup> *Ibid*, p. 65.

orang sosialis dari aliran manapun yang sungguh-sungguh setuju untuk membela otoritarisme yang permanen, dan banyak di antara mereka yang tetap percaya bahwa pemerintahan yang demokratis dapat menyelesaikan masalah.<sup>9</sup>

Carl Gershaman membela sosialis demokrat dengan mengutip pendapat Ravel dan Aron yang mengatakan, sosialis demokrat tidak bersifat totaliter, bahkan sistem ini anti totaliter. Ravel mengatakan, sistem produksi kapitalis secara sosial bersifat netral yang tujuannya semata-mata bersifat ekonomi, sistem ini hanya mengatur soal-soal produksi, laba, dan investasi, tetapi tidak memiliki tujuan sosial. Oleh karena itulah sosialis demokrat melengkapinya dengan suatu tujuan sosial yaitu dengan menggunakan kekayaan yang diproduksi oleh kapitalisme untuk memajukan kehidupan sosial masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam melihat peranan negarapun, sosialis demokrat berbeda pandangan dengan komunisme dan liberalisme. Dalam pandangan sosialis demokrat, negara memiliki peran penting untuk mengatur hidup masyarakat dalam bernegara. Berbeda dengan pandangan liberal yang menginginkan peranan minimal negara. Dalam pandangan sosialis demokrat juga menempatkan pemilihan umum dalam pandangan mereka sebagai sarana perjuangan secara konstitusional.



**Gambar 1. Peran Negara Dalam Masyarakat Sosialis<sup>11</sup>**

Dalam teori awalnya, kapitalisme akan dihancurkan lewat revolusi, namun dalam prakteknya, kelompok sosialis demokrat melihat ada kemungkinan untuk mencapai tujuan-tujuan sosialisme setapak demi setapak, yaitu dengan cara kaum sosialis demokrat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki di parlemen, berjuang melalui kebijakan, berbagai peraturan, serta perundang-undangan di bidang sosial dan politik untuk kepentingan kelas pekerja.<sup>12</sup>

Kerangka teori tersebut dijadikan acuan dalam menganalisis bagaimana pergerakan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Selain itu metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dalam pandangan Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dipakai untuk meneliti serta menganalisis suatu objek bersifat alamiah. Menurutnya, peneliti merupakan instrument kunci pada penelitian ini. Hasilnya lebih

<sup>9</sup> *Ibid*, p. 31.

<sup>10</sup> *Ibid*, p. 49.

<sup>11</sup> Thomas Meyer, *Sosial-Demokrasi Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: CSDC, 1998), p. 35.

<sup>12</sup> *Ibid*., p. 43.

penekanan pada makna serta analisis data bersifat kualitatif.<sup>13</sup> Seperti yang dikatakan oleh Creswell, metode kualitatif digunakan untuk memahami suatu gejala sentral dan juga mengeksplorasi masalah itu. Analisis dokumen digunakan dalam memperoleh data penelitian ini. Richie dan Lewis menyebutkan, analisis dokumen adalah menganalisis serta mengkaji pada macam-macam dokumen, baik yang bersifat pribadi dan umum. Hal ini dilakukan untuk menangkap makna di dalam isi dokumen serta memahaminya. Data diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, berita dan dokumen lainnya.<sup>14</sup>

Dengan menggunakan metode kualitatif serta jabaran mengenai sosialis demokrat tersebut, penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana praktek aliran pemikiran sosialis demokrat di Indonesia dengan mengambil kasus pada Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang beraliran sosialis demokrat. Analisis dilakukan tidak hanya dengan melihat sejarah maupun kiprah PSI dalam panggung perpolitikan di Indonesia, tetapi juga melihat pada aspek kegagalan partai tersebut pada pemilu 1955, serta melihat kecocokan atau kesesuaiannya dengan iklim demokrasi di Indonesia.

## **Pembahasan**

### **PSI dan Gerakannya di Indonesia**

Herbert Feith dan Lance Castles membagi lima aliran pemikir politik di Indonesia dalam rentang tahun 1945 hingga 1965, yaitu (1) Nasionalisme Radikal, (2) Tradisionalisme Jawa, (3) Islam, (4) Sosialisme Demokrat, dan (5) Komunisme. Aliran pemikiran sosialisme demokrat sendiri terlihat dalam Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan program dan bentuk gerakannya, walaupun Feith dan Castles juga menyebutkan bahwa aliran pemikiran ini juga mempengaruhi golongan lain seperti dari Islam, nasionalis, kristen, dan lainnya. Feith dan Castles juga menjelaskan, PSI banyak terpengaruh oleh gagasan sosialisme demokrat dari Eropa yang terlihat dalam pemikiran Sutan Sjahrir dan pengikutnya.<sup>15</sup>

Sebelum lahirnya Partai Sosialis Indonesia (PSI), Sutan Sjahrir membentuk Partai Rakyat Sosialis (Paras). Adapun Amir Sjarifoeddin mendirikan Partai Sosialis Indonesia (Parsi). Tak lama kemudian, kedua partai ini melebur menjadi Partai Sosialis karena dianggap memiliki kesamaan yaitu beraliran sosialis. Partai Sosialis inilah yang berhasil menggaet kalangan intelektual khususnya mahasiswa. Bahkan, partai ini menjadi salah satu partai yang diperhitungkan dalam panggung sejarah Indonesia karena memiliki 17,5% kursi (35) dari jumlah 200 kursi di Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI). Selain itu, Partai Sosialis juga berhasil menempatkan lima perwakilannya pada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan ketua dari Badan tersebut berasal dari Partai Sosialis yaitu Soepeno.<sup>16</sup>

Walaupun sama-sama beraliran sosialis, dalam perjalanannya kemudian partai ini pecah. Perpecahan ini tidak lepas dari cara pandang, visi, serta bentuk perjuangan partai yang berbeda diantara tokoh-tokoh PSI. Perbedaan pandangan terjadi antara Sutan Sjahrir dan kawan-kawan dengan Amir Sjarifuddin yang dulunya menjabat sebagai wakil ketua PS.<sup>17</sup> Perpecahan tersebut terlihat sejak Kabinet Sjahrir III yang dipimpin Sjahrir menyetujui Perjanjian Linggarjati pada

<sup>13</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

<sup>14</sup> Jane Ritchie dan Jane Lewis (ed). *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*, (London: Sage Publication, 2003).

<sup>15</sup> Herbert Feith dan Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1995), p. vii.

<sup>16</sup> George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, (Depok: Komunitas Bambu, 2013).

<sup>17</sup> Jhon D Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003)

1946 yang dianggap merugikan Indonesia. Padahal Partai Sosialis sudah dianggap sebagai salah satu partai yang mampu menguasai perpolitikan Indonesia di masa awal perjuangan mempertahankan Indonesia. Ini terlihat dari orang-orang dari Partai Sosialis yang memimpin kabinet dari Noveber 1945 hingga 1947 dengan kabinet diketuai oleh orang Partai Sosialis yaitu Kabint Sjahrir I, II, III dan Kabinet Amir Syarifuddin I serta II.<sup>18</sup>

Sutan Sjahrir dan kawan-kawan kemudian mendirikan PSI yang menolak komunisme dan tetap berjuang dengan cara yang halus, sedangkan Amir Sjarifuddin dan pengikutnya membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang kemudian melakukan pemberontakan Madiun pada 1948 yang dipimpin oleh Musso. Sutan Sjahrir sendiri melawan ajaran dan pengaruh komunisme di Indonesia<sup>19</sup> Pendekatan yang digunakan oleh Amir Sjarifuddin lebih kepada penggunaan pendekatan dengan cara kekerasan atau revolusi yang menjadi ciri khas dari komunisme.

PSI sendiri menolak cara berjuang yang dilakukan oleh komunisme yang menggunakan cara kekerasan. Bagi PSI, komunisme lebih cenderung mengarah pada totaliter, adapun PSI sendiri menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi termasuk kebebasan. PSI merupakan partai yang ketat dalam menyeleksi calon anggotanya. Tahun 1952 PSI mempunyai 3.049 anggota tetap dengan 14.480 sebagai calon anggota yang dikelola dalam 147 cabang. Jumlah ini meningkat menjadi 50.000 orang pada Juni 1955 bertepatan dengan kongres kedua partai. Hingga tahun pada tahun 1959, jumlah cabang PSI meningkat dengan 1.057 cabang di 22 provinsi dan 185 cabang di tingkat kabupaten/kota. Tujuan utama partai ini adalah pembangunan kader, namun tetap aktif dalam berkampanye.<sup>20</sup>

Dalam visi dan misi PSI sangat ditekankan bagaimana partai ini berjuang demi demokrasi. Tujuan dari PSI terlihat dalam anggaran dasarnya yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sosialis yang berakar pada kerakyatan yaitu menghilangkan penindasan terhadap rakyat, menjamin kesatuan, kemakmuran, dan kemajuan Indonesia. Ideologi sosialisme yang dikembangkan oleh PSI sendiri bukan merupakan sosialisme yang merupakan tahap awal menuju komunisme, karena cara-cara yang digunakan oleh PSI adalah cara-cara yang konstitusional seperti halnya perjuangan yang dilakukan oleh partai sosialis demokrat di Eropa. Mereka tidak melakukan revolusi, tetap berpijak pada demokrasi, serta perjuangannya yang tetap mentaati prosedur atau aturan konstitusi, menjunjung hak-hak asasi, serta pemilihan umum yang bersifat demokratis.<sup>21</sup>

Dalam program-program yang ditawarkan oleh PSI, program yang diletakkan pada urutan pertama adalah penjaminan hak asasi manusia sesuai termaktum pada *Universal Declaration of Human Rights*. Partai beraliran sosialis demokrat ini juga mendorong agar negara menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Pencapaian untuk mewujudkan kemakmuran dicapai dengan usaha-usaha yang datang dari negara, perseorangan, maupun organisasi rakyat. Dalam bidang ekonomi, PSI berpandangan bahwa 1) negara harus mengatur proses ekonomi, 2) negara memimpin dan mengawasi proses ekonomi, 3) Dalam memperkuat ddasar dari ekonomi kerakyatan, maka negara harus mampu mendorong dan membimbing masyarakat, 4) koperasii dijadikan sebagai dasar kehidupan.<sup>22</sup> PSI menekankan pentingnya jaminan atas pekerjaan dan jaminan sosial lainnya, sehingga partai tersebut mempunyai program

<sup>18</sup> Wijanarko Puspoyo, *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono*, (Solo: Era Adicipta Intermedia, 2012)

<sup>19</sup> M. Fadjoel Rachman, *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat*, (Depok: Koekoesan, 2007), p. 292.

<sup>20</sup> P.Y. Nur Indro, "Kontribusi Soetan Sjahrir Terhadap Pemikiran Politik Partai Sosialis Indonesia Tentang Sosialisme Demokratis", *Tesis*, (Depok: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997), p. 136.

<sup>21</sup> Agus Mediarta, "Orientasi Kader sebagai Strategi Utama Politik Kepartaian di Indonesia Studi Kasus Partai Sosialis Indonesia (1948-1955)", *Skripsi*, (Depok.: Universitas Indonesia, 2001).

<sup>22</sup> Gili Argenti, "Kiprah Partai Politik Sosialis Indonesia," *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol 2 No. 1, 2017.

di bidang perburuhan yang menjadi ciri khas negara kesejahteraan. Program itu adalah 1) mengupayakan penghilangan pengangguran serta eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia, 2) penjaminan atas hak-hak dasar yang berkaitan dengan sosial, seperti hak bekerja, hak mendapatkan upah kerja, dan hak sosial lainnya, 3) mengusahakan asas kerakyatan pada perusahaan, dan 4) peyempurnaan undang-undang perburuhan dan jaminan sosial dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>23</sup>

PSI juga konsen dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, masalah gender, dan pertanian. PSI menuntut, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan negara berkewajiban dalam menjamin hak tersebut terpenuhi. PSI juga memperjuangkan jaminan sosial yang menjadi ciri khas dari sosialis demokrat di Eropa. Jaminan sosial tersebut untuk yatim piatu, kaum cacat, orang tua, jaminan kesehatan, dan pendidikan. Dalam bidang internasional sendiri, PSI mendorong agar penyelesaian konflik internasional diselesaikan dengan cara yang damai, mendorong pebentukan organisasi-organisasi internasional untuk kesejahteraan dan perdamaian, serta keadilan bagi masyarakat.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam praktek politiknya, PSI ikut andil dalam perpolitikan di Indonesia, walaupun peran tersebut kemudian semakin berkurang. Ini tampak dari keikutsertaan PSI dalam Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Dalam Kabinet Natsir terdapat dua orang dari PSI yaitu Tandiono Manu sebagai Menteri Pertanian dan Soemitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian Indonesia. Kabinet Natsir tersebut juga kebanyakan di isi oleh tokoh yang dekat dengan PSI seperti Mr Assat, Abdul Halim dan Hamungku Buwono IX. Pada Kabinet Wilopo terdapat dua tokoh dari PSI yang menjabat yaitu Lukman Wiradinata sebagai Menteri Kehakiman dan Soemitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Keuangan. PSI tidak diikuti dalam Kabinet Sukiman dan Kabinet Ali Sastroamidjojo.<sup>25</sup>

Banyak tokoh-tokoh PSI yang sudah berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia, mulai sebelum kemerdekaan hingga pasca Indonesia merdeka seperti Sutan Sjahrir, Hamid Algadri, A.M. Thalib, Hamdani, Makmun Sumadipraja, Soemitro Djojohadikusumo, Soepeno dan banyak tokoh lainnya. Tokoh paling sentral dari PSI adalah Sutan Sjahrir karena gagasan Sosialis Demokrat atau lebih dikenal dengan Sosialis Kerakyatan merupakan pikiran darinya. Dalam angket yang dibuat oleh Koran Abadi pada 1952 tentang tokoh-tokoh terkemuda di Indonesia, Sutan Sjahrir termasuk ke dalam sepuluh tokoh paling terkemuka bersama tokoh minang lainnya yaitu Agus Salim, Muhammad Hatta dan Mohammad Natsir.<sup>26</sup>

Dari gerakan, pemikiran dan tujuan PSI di Indonesia terlihat bahwa partai ini memiliki pandangan sosialis demokrat yang sama dengan partai-partai sosialis demokrat yang ada di Eropa. Hal ini terlihat dari program yang diperjuangkan oleh PSI, serta bagaimana PSI menolak dan melawan pengaruh komunisme di Indonesia. Sebagai sosialis demokrat, PSI bertujuan untuk membentuk masyarakat sosialis tetapi tetap berdasarkan pada demokrasi, sehingga dalam perjalannya, PSI juga ikut dalam pemilihan umum 1955. Perjuangan yang dilakukan oleh PSI dilakukan dengan cara persuasif, evolusi, bukan kekerasan. Bahkan PSI menyatakan sikap tidak sepaham dengan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan menjatuhkan skors

<sup>23</sup> Rachman, *Demokrasi*, p. 293-294

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. 295-296.

<sup>25</sup> Armedyestu Priyonggo, Yety Rochwulaningsih, Indriyanto, "The Indonesian Socialist Party (PSI) 1950-1959: Political Role and Progress during Liberal Democracy," *Indonesian Historical Studies*, Vol. 2, No. 1, 2018.

<sup>26</sup> Tempo, *Orang Minang Dalam Elite Indonesia*, (Tempo: majalah.tempo.co/read/nasional/35402/orang-minang-dalam-elite-indonesia, Diakses 15 Desember 2020, 1986.

pada Soemitro, salah satu tokoh PSI yang ikut dalam PRRI. Sehingga pendapat Peter L Berger yang mengatakan bahwa sosialisme memiliki korelasi negatif dengan demokrasi terbantahkan karena dalam parkteknnya di Indonesia, sosialisme dalam bentuk sosialis demokrat memiliki korelasi yang positif dalam perkembangan demokrasi Indonesia, dan bahkan PSI merupakan salah satu partai yang berkontribusi dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

### **Kegagalan dan Bubarnya PSI**

Ketika awal kembalinya Indonesia ke dalam bentuk negara kesatuan pada 1950, PSI mempunyai 17 kursi atau 7,3% di dari total 232 kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Jumlah ini hanya kalah dari PNI yang memiliki 49 kursi dan Partai Masyumi dengan 36 kursi. Namun, dalam perjalanannya, di saat partai politik yang bercorak sosialis demokrat di Eropa pada masa itu meraup kemenangan, di Indonesia, PSI mengalami kegagalan dalam pemilu 1955. Walaupun PSI dan tokohnya telah memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia, namun ternyata partai ini mengalami kekalahan dalam pemilu 1955.<sup>27</sup> Pada Pemilu 1955, PSI hanya meraup 1,99 persen suara dalam pemilihan anggota DPR dan 1,84 persen pada konstituante, hanya meraih 5 kursi di parlemen dan 10 wakil di konstituante. Berbeda jauh dengan partai lainnya seperti Masyumi yang memperoleh 57 kursi, PNI dengan 57 kursi, Nahdlatul Ulama mendapatkan 45 kursi, dan bahkan lawan PSI yaitu PKI yang berhasil meraih 39 kursi di DPR. Hamid Algadri melihat bahwa salah satu faktor kegagalan dari PSI pada pemilu 1955 adalah terletak pada program-program PSI yang diformulasikan dengan cara yang terlalu intelektual.<sup>28</sup>

Menurut Rusdi di dalam tesisnya yang berjudul “Partai Sosialis Indonesia dan Peranan Kepolitiannya 1948-1960” menyebutkan beberapa faktor kekalahan PSI dalam pemilu 1955 yaitu 1) PSI tidak memiliki basis budaya ataupun agama seperti yang dimiliki oleh Masyumi dan NU, 2) PSI tidak memiliki symbol-simbol yang bisa menarik minat serta menghimpung kaum abangan dalam mewalan kaum santri, santri, menghimpun kaum petani, ataupun yang bersifat kesukuan, 3) program-programnya yang hanya dimengerti oleh kalangan intelektual, sehingga masyarakat bawah belum siap menerima program PSI, 4) penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh rakyat bawah, 5) petinggi politik PSI yang lebih banyak tinggal di Jakarta, sehingga tidak menjangkau rakyat kecil, 6) tidak bisa membaca situasi politik di Indonesia.<sup>29</sup>

John D. Legge menyebutkan, salah satu faktor gagalnya PSI dalam meraup dukungan adalah tidak memiliki basis massa yang kuat serta partai yang terkesan hanya untuk kalangan intelektual, sedangkan bagi kebanyakan orang, arti intelektual lebih kepada orang-orang yang terasingkan dari masyarakat atau lingkungannya. Hal ini semakin diperkuat dengan pandangan Soebadio Sastrosatomo yang menyebutkan, PSI bukan partai massa tetapi ia adalah partai kader. Bahkan, Sjahrir menjelaskan tujuan PSI berpolitik bukanlah untuk berkuasa, namun untuk mendidik yang nantinya akan melahirkan basis massa PSI.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Hanif Setiawan, “Sutan Sjahrir, Sosialisme, dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia tahun 1927-1962,” *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9 No 1, 2020.

<sup>28</sup> P.Y. Nur Indro, *Kontribusi*, p, 138.

<sup>29</sup> Rusdi, “Partai Sosialis Indonesia dan Peranan Kepolitiannya 1948-1960”, *Tesis*, (Depok: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997), p. 144-152.

<sup>30</sup> Fadrik Aziz Firdausi, *Sejarah Partai Sosialis Indonesia: Galau dalam Kenaifan Politik*, (Tirto: <https://tirto.id/sejarah-partai-sosialis-indonesia-galau-dalam-kenaifan-politik-dgq5>, Diakses 25 Desember 2020, 2019).

Berdasarkan dari paparan di atas, penelitian ini melihat kegagalan PSI dalam pemilu 1955, lebih banyak disebabkan oleh faktor internal PSI itu sendiri. Penempatan diri yang eksklusif, ketidakmampuan membaca situasi politik dan masyarakat saat itu, serta PSI yang tidak memiliki basis yang kuat berdasarkan pada budaya maupun agama. PSI tidak mampu menyesuaikan diri dengan budaya dan agama di Indonesia. Terlalu banyak orang-orang intelektual di dalamnya sehingga PSI tidak mampu menghimpun kekuatan yang bersifat primordial. Hal ini juga terhambat karena PSI sendiri menolak hal-hal yang berbau primordial. Padahal tidak semua masyarakat Indonesia memiliki pendidikan yang tinggi, serta banyak masyarakat Indonesia yang masih terikat dalam ikatan primordial.

Kegagalan PSI sebagai partai politik semakin terlihat dengan terlibatnya beberapa tokoh PSI dalam PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Tokoh-tokoh dan simpatisan PSI yang terlibat seperti Sumitro Djojohadikusum, Sutan Mohammad Rasjid, Des Alwi, E.S.Pohan dan Tan Po Goan. Sebuah perlawanan yang berawal dari rasa tidak adil tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta Presiden Soekarno dianggap melanggar konstitusi karena mengangkat dirinya sebagai formatur dan membentuk kabinet. Keterlibatan tokoh PSI dalam PRRI sendiri sebenarnya mendapatkan penentangan dari Sutan Sjahrir dan petinggi PSI lainnya. Bahkan, Sjahrir sudah berupaya mengirim utusan PSI untuk menemui Soemitro di Sumatera. Ia mengutus Djoer Mohammad dan partai juga mengutus Djohan Sjahroezah selaku sekretaris partai untuk menyampaikan pesa Sjahrir dan Hatta pada PRRI, dan dari PSI khususnya menemui Soemitro.<sup>31</sup>

Inti dari pesan yang disampaikan oleh Sjahrir adalah partai mendukung perjuangan daerah, namun menentang adanya pemerintahan tandingan, hal ini dikarenakan lahirnya pemerintah tandingan akan menyebabkan korban jiwa dan merusak Indonesia. Pesan tersebut sampai pada Soemitro, namun diabaikannya. Keterlibatan Soemitro yang terlalu jauh dengan PRRI, pada akhirnya membuat PSI mengeluarkan pernyataan bahwa PSI tidak setuju dengan PRRI, namun mendukung otonomi bagi daerah sesuai dengan amanat konstitusi. PSI juga menskors Soemitro.<sup>32</sup>

Keterlibatan tokoh-tokoh tersebut menjadikan alasan bagi Presiden Soekarno untuk membubarkan PSI. Presiden Soekarno setelah mendengarkan pendapat Mahkamah Agung memberikan waktu satu bulan bagi Masyumi dan PSI untuk membubarkan diri. Pembubaran tersebut berdasarkan pada Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960. Kemudian dikeluarkan Kerpres No.201 tahun 1960 yang berisi tentang pembubaran Partai Sosialis Indonesia. Alasan pembubaran adalah untuk keselamatan bangsa dan pemimpin partai tersebut ikut dalam PRRI.<sup>33</sup>

Penelitian ini melihat, kegagalan dan bubaranya PSI bukan disebabkan oleh aliran sosialis demokratnya. Dalam tataran praktek PSI dengan sosialis demokratnya memberikan sumbangsih pemikiran dan program politik yang memberikan kontribusi positif bagi demokrasi di Indonesia. Kegagalan PSI lebih disebabkan dari internal PSI sendiri yang tidak bisa menarik massa, serta kondisi perpolitikan saat itu, dimana PSI berseberangan dan cenderung menjadi oposisi bersama

---

<sup>31</sup> Martin Sitompul, *Beda Cara PSI dan Masjumi*, (Historia: <https://historia.id/politik/articles/beda-cara-psi-dan-masjumi-PKlyp>, Diakses 26 Desember 2020, 2019).

<sup>32</sup> Hendri F. Isnaeni, *CIA, PRRI, dan PSI*, (Historia: <https://historia.id/politik/articles/cia-prri-dan-psi-P0pe7>, Diakses 26 Desember 2020, 2019).

<sup>33</sup> Sapti Eka Pratiwi, "Pembubaran Partai Politik di Indonesia pada Masa Dmokrasi Terpimpin," *AVATAR, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 4 No. 3, 2016.

Partai Masyumi terhadap Presiden Soekarno. Pembubaran PSI, lebih disebabkan oleh kondisi politik Indonesia saat itu, walaupun petingginya menentang PRRI.

### **Kecocokan dengan Demokrasi**

Dalam prakteknya di negara-negara Eropa maupun Indonesia, sosialisme dalam bentuk sosialis demokrat menunjukkan bahwa sosialisme dalam versi ini kompatibel atau sesuai dengan demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan partai-partai sosialis demokrat di Eropa seperti di Swedia, dimana partai sosialis berkuasa selama 44 tahun (1932-1976) dan kembali berkuasa pada tahun 1982, kemenangan partai sosialis demokrat di Jerman, Inggris, dan negara-negara Skandinavia lainnya.

Sosialis demokrat juga tidak bertentangan dengan demokrasi dengan tetap mempertahankan kebebasan, tidak menggunakan kekerasan, ikut dalam pemilihan umum, menggunakan cara persuasi bukan revolusi, dan bahkan memberikan solusi penyelesaian terhadap efek negatif yang timbul dari kapitalisme. Ketika partai-partai yang bercorak sosialis demokrat menang di negara Skandinavia, mereka tetap mempertahankan lembaga-lembaga demokrasi dan kebebasan serta tidak menjadi negara yang otoriter maupun totaliter seperti yang dikatakan oleh Peter L. Berger.

Sosialis demokrat sendiri tidak menghilangkan kapitalisme seperti yang dilakukan oleh komunisme yang menginginkan kapitalisme harus dihancurkan. Andrew Heywood mengatakan bahwa sosialis demokrat mendukung keseimbangan antara pasar dan negara dengan penerimaan terhadap kapitalisme sebagai mekanisme untuk membangun kemakmuran dan pendistribusiannya dengan prinsip moral untuk kesejahteraan rakyat.<sup>34</sup> Sehingga dalam hal ini, negara ikut berperan dalam membangun kemakmuran masyarakat.

Dalam prakteknya, PSI memiliki pandangan yang berbeda dengan komunisme, mulai dari cara berjuang dimana PSI berjuang dengan cara persuasi dan menaati hukum yang ada. Berbeda dengan komunisme yang menyandarkan perjuangannya pada revolusi. PSI juga mengedepankan program-program jaminan sosial, serta menekankan pentingnya peranan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan PSI berkontribusi dalam perkembangan demokrasi Indonesia melalui perjuangan dan pemikiran tokoh-tokohnya. Artinya sosialis demokrat yang diusung oleh PSI tidak bertentangan dengan demokrasi Indonesia, bahkan sebaliknya. Partai-partai sosialis demokrat di Eropa juga menunjukkan bahwa sosialisme versi sosialis demokrat tidak bertentangan dengan demokrasi, bahkan sosialis demokrat memberikan kontribusi dalam perkembangan demokrasi. Artinya, sosialisme versi sosialis demokrat sesuai atau kompatibel dengan demokrasi. Sosialis demokrat memiliki hubungan yang positif dengan demokrasi. Berbeda dengan pandangan Peter L. Berger yang mengatakan bahwa sosialisme memiliki hubungan negatif dengan demokrasi.

### **Kesimpulan**

Paham sosialis demokrat memang terlihat dalam perjuangan PSI di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari Sutan Sjahrir. Pandangan sosialis demokrat ini terlihat dalam

---

<sup>34</sup> Andrew Heywood, *Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), p. 75.

perjuangan serta program-program PSI yaitu memperjuangkan hak asasi manusia, kebebasan, jaminan sosial, melawan pengaruh komunisme, berjuang dengan cara persuasi, evolusi, serta berjuang dengan cara konstitusional. Program-program yang ditawarkan PSI pun merupakan ciri khas dari sosialis demokrat yaitu program jaminan sosial, hak asasi manusia, serta menuntut adanya peranan negara untuk kemakmuran.

Dalam perjalanan politiknya, PSI mengalami kegagalan dalam Pemilu 1955 serta dibubarkan pada 1960. Adapun kegagalan PSI pada Pemilu 1955 tidak lepas dari faktor internal partai seperti PSI yang tidak memiliki basis budaya maupun agama, PSI yang menempatkan diri eksklusif yang tidak mampu menjangkau masyarakat bawah, ketidakmampuan PSI dalam membahas situasi politik dan masyarakat Indonesia, program-program serta bahasa yang digunakan tidak dimengerti masyarakat bawah. Walaupun demikian, PSI dengan sosialis demokrat telah memperlihatkan bahwa sosialis demokrat sesuai atau kompatibel dengan demokrasi dan bahkan dapat memberikan masukan untuk perkembangan demokrasi. Praktek oleh partai sosialis demokrat di Eropa dan Indonesia menunjukkan bahwa nilai sosialis demokrat tidak bertentangan dengan demokrasi. Bentuk perjuangan serta program-program yang ditawarkan oleh partai sosialis demokrat di Eropa maupun Indonesia bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

### Daftar Pustaka

Argenti, Gili, “Kiprah Partai Politik Sosialis Indonesia,” *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol 2 No. 1, 2017.

Ebenstein, William, *Isme-Isme Yang Mengguncang Dunia*, Yogyakarta: Narasi, 2006.

Firdausi, Fadrik Aziz, Sejarah Partai Sosialis Indonesia: Galau dalam Kenaifan Politik, Tirto: <https://tirto.id/sejarah-partai-sosialis-indonesia-galau-dalam-kenaifan-politik-dgq5>, Diakses 25 Desember 2020, 2019.

Feith, Herbert dan Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Hasselbach, Christoph, Perjuangan Sosialis demokrat di Eropa: Antara Kegagalan dan Keberhasilan, Deutsche Welle (DW): <https://www.dw.com/id/perjuangan-sosial-demokrat-di-eropa-antara-kegagalan-dan-keberhasilan/a-49136828>, Diakses pada tanggal 10 desember 2020, 2019.

Heywood, Andrew. *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Indro, P.Y. Nur.. “Kontribusi Soetan Sjahrir Terhadap Pemikiran Politik Partai Sosialis Indonesia Tentang Sosialisme Demokratis”, *Tesis*, Depok: Pascasarjana Universitas Indonesia. 1997.

Isnaeni, Hendri F., CIA, PRRI, dan PSI, Historia: <https://historia.id/politik/articles/cia-prri-dan-psi-P0pe7>, Diakses 26 Desember 2020, 2019.

Kahin, George McTurnan, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, Depok: Komunitas Bambu, 2013.

- Legge, Jhon D, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003.
- Mediarta, Agus, “Orientasi Kader sebagai Strategi Utama Politik Kepartaian di Indonesia Studi Kasus Partai Sosialis Indonesia (1948-1955)”, *Skripsi*, Depok.: Universitas Indonesia, 2001.
- Meyer, Thomas, *Sosial-Demokrasi Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: CSDC, 1998.
- Miriam Budiardjo (ed), *Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi*, Jakarta: PT. Gramedia, 1984.
- Pratiwi, Sapti Eka, “Pembubaran Partai Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin,” *AVATAR, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 4 No. 3, 2016.
- Priyonggo, Armedyestu, Yety Rochwulaningsih dan Indriyanto, “The Indonesian Socialist Party (PSI) 1950-1959: Political Role and Progress during Liberal Democracy,” *Indonesian Historical Studies*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Puspoyo, Wijanarko, *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono*, Solo: Era Adicipta Intermedia, 2012.
- Rachman, M. Fadjoel, *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat*. Depok: Koekoesan. 2007
- Ritchie, Jane dan Jane Lewis (ed). *Qualitative Research Practice: A Guide for SocialScience Students and Researches*, London: Sage Publication, 2003.
- Rivai, Aspin Nur Arifin, “Friedrich Ebert Stiftung dan Sosial Demokrasi: Memahami Aktifitas Gerakan Sosial Global dalam Penyebarluasan Diskursus di Indonesia,” *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Rusdi, “Partai Sosialis Indonesia dan Peranan Kepolitikannya 1948-1960”, *Tesis*, Depok: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997.
- Setiawan, Hanif, “Sutan Sjahrir, Sosialisme, dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia tahun 1927-1962,” *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9 No 1, 2020.
- Sitompul, Martin, *Beda Cara PSI dan Masjumi*, Historia: <https://historia.id/politik/articles/beda-cara-psi-dan-masjumi-PKlyp>, Diakses 26 Desember 2020, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tempo, *Orang Minang Dalam Elite Indonesia*, Tempo: [majalah.tempo.co/read/nasional/35402/orang-minang-dalam-elite-indonesia](http://majalah.tempo.co/read/nasional/35402/orang-minang-dalam-elite-indonesia), Diakses 15 Desember 2020, 1986.